

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdamaian dan keamanan internasional adalah urusan segala bangsa. Demi terwujudnya dua hal ini, negara-negara di dunia bersepakat mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memiliki satu badan utama yaitu Dewan Keamanan (DK) atau *Security Council* yang khusus bertanggung jawab untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan.¹ DK PBB atau *United Nation Security Council* (UNSC) beranggotakan 15 negara. Keanggotaan negara-negara di DK PBB terbagi dua: Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap. Anggota Tetap berjumlah lima negara dan Anggota Tidak Tetap berjumlah 10 negara. Anggota Tetap PBB terdiri Tiongkok, Rusia, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.² Sedangkan Anggota Tidak Tetap DK PBB dipilih oleh Majelis Umum PBB. Delapan dari Anggota Tidak Tetap DK PBB akan menjabat selama dua tahun dan sisanya akan menjabat selama satu tahun. Anggota Tidak Tetap DK PBB dipilih melalui Sidang Umum Majelis Umum PBB.³

Ada tiga keuntungan utama yang diperoleh negara saat menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB. Pertama, adanya kesempatan untuk memengaruhi kinerja dan agenda DK PBB baik secara general maupun spesifik terhadap kasus-kasus tertentu. Kedua, sebagai bentuk dari sikap bertanggung jawab dan kontribusi sebuah negara dibidang perdamaian dan keamanan internasional. Ketiga,

¹ United Nations, "UN Charter" Chapter V Article 24 No. 1, accessed December 1, 2020 <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>

² United Nations, "UN Charter" Chapter V Article 23 No. 1, (accessed December 1, 2020 <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>

³ United Nations, "UN Charter" Chapter V Article 23 No. 2, , accessed December 1, 2020 <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>

membangun reputasi negara dimata dunia sehingga membuka kesempatan untuk mengembangkan relasi dan jaringan dengan aktor-aktor internasional lainnya.⁴ Keuntungan-keuntungan ini membuat kursi DK PBB relevan untuk diperjuangkan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Pencalonan negara sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB pada dasarnya mempertimbangkan dua hal: keterwakilan kelompok regional berdasarkan faktor geografis dan kontribusi negara calon anggota terhadap upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.⁵ Pertimbangan bentuk kontribusi negara dalam pencalonan sebagai Anggota Tidak Tetap dilihat dari kebijakan luar negeri dan respon negara terhadap isu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Kontribusi ini nanti akan menjadi bahan kampanye negara dalam pencalonan untuk meyakinkan negara-negara anggota Majelis Umum PBB agar mempercayakan suara untuk calon Anggota Tidak Tetap DK PBB. Kontribusi ini tidak memiliki bentuk yang baku, tetapi tetap harus relevan dan bisa dipertanggungjawabkan.⁶

Selain memang memenuhi persyaratan formal untuk dicalonkan, ada kriteria lain yang membuat negara lebih mudah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB yaitu dengan dikenal sebagai *middle power*. *Middle power* diprioritaskan agar mendapat tempat lebih banyak dalam DK PBB, khususnya sebagai Anggota Tidak Tetap sebagai salah satu upaya dalam meredam pengaruh berlimpah *The Big Five* yang merupakan Anggota Tetap DK PBB. *Middle Power* dianggap dapat

⁴Ann-Marie Ekengren, Fredrik D. Hjorthen, Ulrika Möller, "A Non Permanent Seat in the United Nations Security Council: Why Bother?" *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organization* Volume 26 Issue 1 (April 2020): 32-33, <https://doi.org/10.1163/19426720-02601007> (accessed September 11, 2020)

⁵United Nations, "UN Charter, Chapter V Article 23 No. 1

⁶"Indonesia for UN Security Council 2019-2020," Kementerian Luar Negeri Indonesia, accessed February 1, 2021 <https://indonesia4unsc.kemlu.go.id/images/documents/Brochure%20-%20Indonesia%20for%20UN%20Security%20Council%202019-2020.pdf>

dipercaya untuk menggunakan pengaruh diplomatik dan kekuatan militer untuk kepentingan masyarakat internasional dan dianggap mampu untuk lebih tidak ‘egois’ daripada *great powers* dan lebih bertanggung jawab daripada *small states*.⁷

Agar bisa menjabat Anggota Tidak Tetap DK PBB, negara calon anggota harus dipilih oleh minimal dua pertiga dari total anggota Majelis Umum PBB yang hadir pada saat Sidang Umum untuk Pemilihan Anggota Tidak Tetap.⁸ Proses pemilihan ini dilakukan dengan metode *secret ballots*.⁹ Negara yang sedang menjabat sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB tidak dapat untuk langsung mencalonkan diri kembali menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk periode selanjutnya setelah masa keanggotaan berakhir. Setelah terpilih, negara memiliki waktu satu atau dua tahun dalam menjabat sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.¹⁰

Indonesia sudah tiga kali menjadi sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB sebelum terpilih untuk keempat kalinya untuk periode 2019-2020 yaitu periode 1973-1974, 1995-1996 dan 2007-2008.¹¹ Selama proses pencalonan untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia tidak pernah lepas dari persaingan dengan negara lain untuk menjadi salah satu perwakilan wilayah Asia.

⁷Carsten Holbraad, *Middle Powers in International Politics* (London: Macmillan 1984): 57-58

⁸ United Nations, “UN Charter, Chapter IV Article 18 No. 1” available from <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text> ; (accessed December 1, 2020)

⁹ United Nations, “Rules of Procedure of the General Assembly No. 92 ” available from <https://undocs.org/pdf?symbol=A/520/Rev.19#page=50> (accessed December 1, 2020)

¹⁰ United Nations, “UN Charter, Chapter V Article 23 No. 2” available from <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text> ; (accessed December 1, 2020)

¹¹ United Nations Security Council “Countries Elected Member” available from <https://www.un.org/securitycouncil/content/countries-elected-members> (accessed January 1, 2021)

Indonesia bersaing dengan Pakistan untuk periode 1973-1974,¹² dengan Jepang untuk periode 1995-1996,¹³ dan dengan Nepal untuk periode 2007-2008.¹⁴

Indonesia mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk periode jabatan 2019-2020. Kampanye pencalonan Indonesia dalam pencalonan ini diumumkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika menghadiri Sidang Umum PBB ke 71 di New York pada 27 September 2016.¹⁵ Pemilihan Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019 – 2020 untuk regional Asia Afrika akan memilih satu perwakilan dari Asia dan satu dari Afrika. Untuk kursi Asia, Indonesia bersaing dengan Maladewa. Pencalonan ini untuk menggantikan Kazakhtan sebagai perwakilan wilayah Asia di DK PBB.¹⁶

Berangkat dari pencalonan ini, Indonesia melakukan kampanye. Terdapat berbagai kontribusi Indonesia untuk perdamaian dan keamanan internasional yang bisa menjadi bahan kampanye Indonesia agar memenangkan pemungutan suara di Majelis Umum PBB demi keanggotaan ini.¹⁷ Tetapi jika berbicara kontribusi, Maladewa sebagai saingan Indonesia juga memiliki kontribusi yang sama artinya untuk perdamaian dan keamanan internasional¹⁸ Fakta bahwa ini kali

¹²United Nation, Plenary Meeting Official Record of General Assembly No.A/PV/.2070, 1972 hal. 2 <https://undocs.org/en/A/PV/.2070> (accessed Desember 1, 2020)

¹³United Nation, Plenary Meeting Official Record of General Assembly No. A/49/PV.40, 1994. hal 3 <https://undocs.org/en/A/49/PV.40> (accessed Desember 1, 2020)

¹⁴ United Nation, Plenary Meeting Official Record of General Assembly No. A/61/PV.32, 2006. Hal. 2 <https://undocs.org/en/A/61/PV.32> (accessed Desember 1, 2020)

¹⁵Tabloid Diplomasi, “Pencalonan Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019- 2020” available from <https://www.tabloiddiplomasi.org/pencalonan-indonesia-sebagai-anggota-tidak-tetap-dewan-keamanan-pbb-periode-2019-2020/> Internet; accessed June 7, 2019

¹⁶ United Nation, Plenary Meeting Official Record of General Assembly No. A/72/PV.93, 2018. Hal 2 <https://undocs.org/en/A/72/PV.93> (accessed Desember 1, 2020)

¹⁷Kementeriann Luar Negeri Indonesia, “Brochure - Indonesia for UN Security Council 2019-2020” available from <https://indonesia4unsc.kemlu.go.id/images/documents/Brochure%20-%20Indonesia%20for%20UN%20Security%20Council%202019-2020.pdf> (accessed February 1, 2021)

¹⁸Permanent Mission of the Republic of Maldives to the United Nations, “Maldives for the United Nations Security Council 2019-2020: Why Maldives?” available from

pertama ikut mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB membuat Maladewa akan lebih mudah mengumpulkan dukungan.¹⁹ Ditambah dengan adanya penurunan persentase dukungan Majelis Umum PBB kepada Indonesia dari waktu ke waktu dalam pencalonan menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB membuat Indonesia harus mengatur strategi untuk meningkatkan peluang memenangkan kursi DK PBB periode 2019-2020 ini.

Tabel 1: Jumlah suara untuk Indonesia pada pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Periode	Negara Pesaing	Jumlah Total Suara	Jumlah Suara Mayoritas 2/3	Jumlah Suara untuk Indonesia	Persentase Suara untuk Indonesia
1973-1974	Pakistan	118	79	115	97,45 %
1995-1996	Jepang	170	114	164	96,47 %
2007-2008	Nepal	192	128	158	82,29 %

Sumber: diolah Peneliti dari berbagai sumber.

Setelah melalui proses pemilihan di Sidang Majelis Umum PBB sesi ke 93 pada 8 Juni 2018, Indonesia terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020. Indonesia memperoleh 144 suara dan mengalahkan Maladewa yang memperoleh 46 suara.²⁰ Kemenangan ini membuat peneliti berasumsi bahwa terdapat upaya Indonesia yang sangat baik dalam proses kampanye untuk pencalonan ini sehingga suara Majelis Umum PBB bisa tertuju kepada Indonesia. Oleh karena itu, Peneliti memandang keberhasilan ini menjadi penting diteliti untuk melihat bagaimana upaya Indonesia dalam pencalonan agar terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB khususnya periode 2019-2020.

http://www.maldivesmission.com/campaign/maldives_for_the_unsc_2019_2020
February 1, 2021

(accessed

¹⁹Ann-Marie Ekengren, Fredrik D. Hjorthen, Ulrika Möller, "A Non Permanent Seat in the United Nations Security Council: Why Bother?": 24

²⁰United Nation, Plenary Meeting Official Record of General Assembly No. A/72/PV.93

1.2 Rumusan Masalah

Keanggotaan sebagai Anggota Tidak Tetap di Dewan Keamanan PBB tidak bersifat *given* maupun bergilir. Indonesia masih mendapat dukungan lebih dari dua pertiga anggota Majelis Umum PBB bukan sebuah kebetulan. Fenomena ini membuat Peneliti berasumsi bahwa tentu tidak hanya sekedar kontribusi, tetapi juga terdapat upaya lain sehingga Indonesia dipercaya kembali oleh negara-negara di dunia untuk berada di DK PBB. Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan Peneliti untuk meneliti lebih lanjut upaya yang dilakukan oleh Indonesia sehingga dalam pencalonan sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini menjawab pertanyaan “bagaimana upaya Indonesia dalam pencalonan menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Indonesia dalam pencalonan menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi titik awal dan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang Indonesia sebagai calon Anggota Tidak Tetap DK PBB dan menambah kepustakaan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional dalam isu ini. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi

bagian dari kajian awal dalam formulasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam tatanan dunia internasional sebagai calon Anggota Tidak Tetap DK PBB.

1.6 Studi Pustaka

Sejumlah penelitian terdahulu yang informatif dan relevan akan dijadikan rujukan untuk mendukung penelitian ini. Sedikitnya, penelitian ini akan menghimpun lima penelitian terdahulu demi menjadikan penelitian ini lebih kredibel dan representatif.

Penelitian pertama berjudul *South Korea's Climate Change Diplomacy: Analysis Based on the Perspective of "Middle Power Diplomacy"* oleh Sungjin Kim yang menjelaskan keberhasilan Korea Selatan sebagai *middle power* dalam isu perubahan iklim dunia²¹ menjadi referensi utama dalam penelitian ini untuk melihat performa negara *middle power* dalam sebuah isu internasional dan berhasil mencapai kepentingannya. Pencapaian Korea Selatan dalam hal ini adalah menjadi sekretariat *Green Climate Fund (GCF)* dalam *Conference of Parties (COP)* ke 18 di Doha pada tahun 2012. GCF adalah pendanaan PBB terbesar untuk menghadapi perubahan iklim dunia yang berasal dari negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi lingkungan. Korea Selatan lulus evaluasi untuk menjadi calon sekretariat GCF dan berhasil memenangkan *secret ballot election* dengan Jerman dan Swiss sebagai saingan.

Kim menjelaskan pola *middle power diplomacy* Korea Selatan dalam isu ini terbagi empat. Pertama, *early mover* dengan menjanjikan akan mencapai target tertinggi dalam mengurangi emisi sebagai negara berkembang dan membangun

²¹ Sungjin Kim, "South Korea's Climate Change Diplomacy" in *Transforming Global Governance with Middle Power Diplomacy: South Korea's Role in 21st Century*, ed Sook Jong Lee (Seoul: Palgrave Mcmillan, 2016), 130-

kerangka kerja institusional domestik dalam bentuk paket kebijakan dan hukum untuk perubahan iklim. Kedua, *bridge* melalui *The Five Year Plan for Green Growth 2009-2013* dengan cara membuat proposal negosiasi terkait perubahan iklim yang lebih bisa diterima kedua belah pihak, baik negara maju maupun negara berkembang berupa pembaharuan bilateral *Clean Development Mechanism* (CDM) menjadi unilateral CDM pada COP6 2000 dan *nationally appropriate mitigation actions* (NAMA) *registry* pada COP15 2009. Ketiga, *coalition coordinator* dengan mendirikan *Environmental Integrity Group* (EIG) bersama *middle power* lainnya yaitu Swiss, Meksiko, dan Liechtenstein pada COP6 2000 sebagai grup negosiasi yang menekankan netralitas untuk menjaga keseimbangan negosiasi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam UNFCCC. Untuk pola terakhir diplomasi *middle power* Korea Selatan terkait perubahan iklim adalah *norm diffuser* dengan norma *green growth*. *Green growth* adalah pertumbuhan ekonomi yang membantu perkembangan keberlanjutan lingkungan, rendah karbon dan pembangunan inklusif sosial. Korea sebagai *green growth norm diffuser* ditegaskan dengan cara menjadikan *Global Green Growth Institute* (GGGI) sebagai organisasi internasional sehingga negara-negara lain bisa yang se-ide dengan norma ini bisa bergabung. Penelitian ini berkontribusi untuk menjadi rujukan utama bagi peneliti untuk melihat negara, sebagai *middle power* dapat mencapai kepentingannya dalam sebuah isu di tatanan internasional. Perbedaan tulisan Kim dengan penelitian ini adalah negara *middle power* yang dianalisis oleh Kim adalah Korea Selatan dalam isu iklim, sementara negara *middle power* yang dianalisis oleh peneliti adalah Indonesia dalam isu perdamaian dan keamanan internasional

Penelitian kedua berjudul *Campaigning for a Seat on the United Nations Security Council: A Middle Power Reflection on the Role of Public Diplomacy* oleh Caitlin Byrne.²² Byrne mengkaji usaha negara-negara *middle power* dalam memanfaatkan diplomasi publik bersama dengan praktik diplomasi tradisional yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kemungkinan terpilihnya sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB, tetapi juga untuk memaksimalkan *soft power* yang nantinya memiliki dampak jangka panjang setelah pemilihan dan keanggotaan sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB berakhir. Byrne mengambil studi kasus pencalonan Australia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk periode keanggotaan tahun 2013-2014 yang sudah diumumkan pada tahun 2008 oleh Perdana Menteri Australia pada saat itu, Kevin Rudd.

Byrne menyayangkan kurangnya pemahaman negara-negara *small and middle power* tentang pentingnya diplomasi publik sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Diplomasi publik memiliki dampak jangka panjang bagi negara berupa reputasi dan posisi strategis di mata khalayak internasional. Usaha diplomasi publik yang berdasarkan waktu yang tepat, sumber daya yang baik, kampanye yang kredibel berdasarkan pencapaian yang baik, dialog yang efektif dan intensi yang baik memberi keuntungan yang melampaui jangka waktu dua tahun sebagai Anggota Tidak tetap DK PBB. Penelitian ini menjadi temuan penting untuk menunjukkan bahwa pernah menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB sebelumnya tidak membuat dunia serta merta selalu percaya dan memilih kembali negara tersebut sebagai Anggota Tidak tetap DK PBB dan menunjukkan

²² Caitlyn Bryne, "Campaining for a Seat on the United Nations Security Council: A Middle Power Reflection on the Role of Public Diplomacy", CPD Perspectives on Public Diplomacy (December 2011)

bahwa negara, dalam hal ini *middle power* harus “berusaha” agar terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.²³

Penelitian ketiga oleh Moch. Faisal Karim dengan judul “*Middle Power, Status Seeking and Role Conception: the Cases of Indonesia and South Korea*”²⁴ berkontribusi dalam penelitian ini untuk menunjukkan Indonesia bersama Korea Selatan sudah dikenal sebagai *middle power* oleh penstudi Ilmu Hubungan Internasional. Indonesia adalah *middle power*, baik secara kapabilitas maupun secara perilaku. Kapabilitas Indonesia seperti sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia, memiliki wilayah terluas di kawasan Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi yang signifikan sejak 2004, dan negara demokratis dengan jumlah penduduk muslim terbanyak. Sementara secara perilaku, tindakan Indonesia sebagai *middle power* adalah berperan sebagai *regional leader, a voice for developing countries, an advocate of democracy and a bridge-builder* dalam berbagai organisasi dan forum internasional seperti ASEAN, APEC, G-20, WTO, IMF, dan *World Bank*.²⁵

Penelitian keempat yang menjadi rujukan untuk penelitian ini adalah skripsi Amy Debora yang berjudul “Pola Diplomasi *Middle Power* Indonesia dalam Meredam Eskalasi Konflik Laut China Selatan Tahun 2014-2017.”²⁶ Debora menyorot keterlibatan Indonesia dalam konflik Laut China Selatan (LCS) pasca eskalasi konflik ini pada tahun 2014. Debora menggunakan konsep *middle power* oleh Higgot, Nassal dan Cooper untuk menjelaskan karakter diplomasi *middle*

²³ Caitlyn Bryne, “Campaining for a Seat on the United Nations Security Council: A Middle Power Reflection on the Role of Public Diplomacy”:

²⁴ Moch Faisal Karim, “Middle Power, Status Seeking and Role Conceptions: the Cases of Indonesian and South Korea,” *Australian Journal of International Affair* (Maret 2018):10-11

²⁵ Moch Faisal Karim, “Middle Power, Status Seeking and Role Conceptions: the Cases of Indonesian and South Korea,”: 10-11

²⁶ Amy Debora, “Pola Diplomasi *Middle Power* Indonesia dalam Meredam Eskalasi Konflik Laut China Selatan Tahun 2014-2017” (Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2018)

power Indonesia terkait konflik LCS yang disebut dengan *middlepowermanship*. *Middlepowermanship* merupakan strategi yang digunakan negara middle power untuk mencapai kepentingan nasional dengan memaksimalkan peran dalam rezim atau institusi internasional.

Karakterisasi *middlepowermanship* Indonesia diejewantahkan melalui empat pola berikut. Pertama, sebagai *coalition builder* Indonesia membangun koalisi internal ASEAN untuk memahami tentang pentingnya keamanan kolektif melalui kerja sama dibidang keamanan jalur laut. Kedua, sebagai *bridge builder* Indonesia menjembatani dialog antara China dengan negara-negara ASEAN yang juga *claimant state* melalui ASEAN Regional Forum (ARF). Indonesia juga memainkan peran sebagai *honest broker* dengan cara memainkan peran semi *think-tank* sebagai bentuk keterlibatan aktif Indonesia dalam manajemen dan resolusi konflik LCS. Ketiga, sebagai *norm entrepreneur* Indonesia berusaha menentang *norm* yang dibangun oleh China terkait LCS dengan menciptakan *norm* yang baru melalui narasi LCS adalah *public goods*, bukan *private goods*. Keempat *niche diplomacy*. Indonesia memfokuskan keterlibatan dalam konflik LCS meskipun bukan *claimant state* dengan cara menjadikan isu maritim menjadi poros pembangunan nasional Indonesia. Penelitian menjadi penting bagi peneliti untuk memperkuat analisis mengenai Indonesia sebagai *middle power* meski dalam konteks isu yang berbeda.

Artikel “Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi ‘Middle Power’ Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo”

oleh Rizky Alif Alvian dkk²⁷ menjadi rujukan kelima untuk penelitian ini. Artikel ini menggunakan pendekatan Krasner tentang *relational power* dan *meta power* untuk menggambarkan perubahan diplomasi *middle power* Indonesia dari rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke rezim Joko Widodo (Jokowi). Alvian dkk juga merangkum tiga teknik penggunaan *power* untuk membandingkan pola diplomasi *middle power* yang berorientasi pada *relational power* atau *meta power*. Ketiga teknik tersebut adalah penanganan konflik via peningkatan sumber daya strategis, pengaturan institusi, dan pengaturan normalitas. Alvian dkk mengambil isu perbatasan dan maritim serta demokrasi, Islam dan hak asasi manusia untuk studi kasus artikel ini.

Temuan Alvian dkk menunjukkan pada masa SBY, diplomasi *middle power* Indonesia pada rezim SBY berorientasi pada *relational power*. Studi kasus menunjukkan SBY mengutamakan dialog dan cara-cara damai untuk menyelesaikan konflik sehingga menjadi pemain dominan dalam konstruksi normalitas *good international citizen* kemudian berusaha meraih *power* melalui sejumlah peran. Sementara Jokowi memilih bersikap yang dinilai asertif dan konfrontatif karena tidak mengikuti normalitas sebelumnya. Jokowi menciptakan normalitas baru melalui institusi yang kemudian bisa diikuti oleh *international citizen* lainnya (dalam hal ini negara). Oleh karena itu, diplomasi *middle power* Indonesia pada rezim Jokowi dinilai berorientasi pada *meta-power*. Penelitian ini berkontribusi untuk menunjukkan bahwa Indonesia pada masa pencalonan, kampanye, dan terpilih menjadi Anggota Tidak tetap DK PBB 2019-2020 berada dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang masih menjaga peran Indonesia

²⁷ Rizky Alif Alvian dkk, "Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo." Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6 No. 2 (Maret 2018)

sebagai *middle power* dalam tatanan internasional meskipun berbeda pendekatan dengan presiden sebelumnya.

Berdasarkan lima penelitian ini, peneliti menemukan landasan analisis yang membantu memperjelas signifikansi penelitian ini yaitu: 1) sebagai *middle power*, negara bisa berhasil mencapai tujuannya pada isu-isu tertentu; 2) negara harus berusaha agar bisa menjadi Anggota Tidak tetap DK PBB; 3) Indonesia adalah negara *middle power*; 4) Indonesia pernah terlibat dan berhasil sebagai *middle power* dalam sebuah isu internasional; 5) Indonesia tetap dikenal sebagai *middle power* dalam kepemimpinan Presiden Jokowi ketika terpilih menjadi Anggota Tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Dari kelima penelitian ini, ada beberapa kesamaan seperti membahas *middle power*, melibatkan DK PBB, dan menganalisa Indonesia tetapi belum ada yang meneliti upaya Indonesia sebagai *middle power* dalam pencalonan menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

1.7 Kerangka Konseptual.

1.7.1 Middle Power

Eksistensi *middle power* dalam ranah hubungan internasional sudah ada sejak Giovanni Botero, Walikota Milan pada abad ke-15, mendefinisikan '*middle power*' sebagai aktor dengan kekuatan dan otoritas yang cukup untuk berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan aktor lain.²⁸ Upaya klasifikasi aktor negara berdasarkan *power* pertama kali menjadi bahan perdebatan diplomatik saat penyelesaian Perang Napoleon secara damai tahun 1815. Saat itulah negara golongan *middle power* secara resmi diakui, di antaranya adalah Jerman.²⁹ *Middle power* mulai dikaji secara masif dalam studi hubungan internasional kontemporer

²⁸ Martin Wight, *Power Politics* (London: Royal Institute of International Affairs, 1978), 298

²⁹ Martin Wight, *Power Politics*, 63

pada akhir Perang Dunia II ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* membahas tentang komposisi dan kekuatan Dewan Keamanan PBB.³⁰

Middle power adalah negara yang kemampuan material, kapasitas, pengaruh dan perilaku berada “di tengah” dan menunjukkan kecenderungan untuk mempromosikan kohesi dan stabilitas di sistem internasional.³¹ Selain dinilai melalui kapabilitas, *middle power* juga dinilai melalui perilaku. Hal ini dilakukan karena adanya negara yang secara kapabilitas berada ‘di tengah’ tetapi tidak berperilaku sebagai ‘penengah’ dan adanya negara yang bertindak sebagai ‘penengah’ tetapi kapabilitas yang dimiliki tidak berada ditengah.³²

Peneliti memilih konsep *middle power* model perilaku (*behavioral*) yang dikembangkan oleh Charalampos Efstathopoulos dalam artikelnya yang berjudul *Middle Powers and The Behavioral Model* untuk penelitian ini. Konsep ini cocok untuk mengidentifikasi pola perilaku negara sebagai *middle power*.³³ Efstathopoulos mensyaratkan ada enam aspek yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi *middle power* dari pendekatan perilaku.

1. Good international citizens

Middle power konsisten menyusun kebijakan luar negeri dalam konteks *good international citizens* yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. Perilaku ini sebagai pembeda *middle power* dari negara-negara yang dianggap ‘egois’. Reputasi sebagai *good international citizens* menjadi kepentingan utama karena memungkinkan *middle power* menikmati status sebagai

³⁰ Carsten Holbraad, *Middle Powers in International Politics* (London: Macmillan 1984) 57-58

³¹ Eduard Jordaan, “The Concept of A Middle Power in International Relations: Distinguish Between Emerging and Traditional Middle Powers” *Politikon*, 30(1) (November 2003): 165, <https://doi.org/10.1080/0258934032000147282> (accessed November 13, 2020)

³² Charalampos Efstathopoulos, “Middle Power and The Behavioral Model” *Global Society* 32 (1) (2018): 47-69

³³ Charalampos Efstathopoulos, “Middle Power and The Behavioral Model”: 47-69

aktor internasional yang kredibel. *Middle power* berperilaku menunjukkan komitmen sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan untuk dan karena tujuan instrumental atau karena sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan meski tanpa menginternalisasi norma-norma ini diinstitusi domestiknya.³⁴

2. Multilateralisme

Middle power menunjukkan preferensi yang kuat untuk multilateralisme dan terlibat dalam aktivisme multilateral dalam kebijakan luar negeri mereka. *Middle power* memandang institusi internasional sebagai kerangka ideal untuk mengatur urusan internasional dan berusaha untuk memberikan solusi multilateral untuk masalah global. Keterlibatan *middle power* dalam aktivisme multilateral bertujuan untuk mengatasi kurangnya posisi tawar ditingkat unilateral dan bilateral, dan mendapatkan legalitas, legitimasi, dan otoritas moral untuk inisiatif diplomatik asertifnya.³⁵

3. Leadership in Crisis Management

Middle power membuktikan kepemimpinan dalam manajemen krisis dan menunjukkan aktivisme sebagai penengah dalam perselisihan dan konflik internasional (*leadership in crisis management*). Inisiatif dalam resolusi konflik dianggap titik genting yang penting dalam meningkatkan status *middle power* yang dikenal pro kemanusiaan. *Middle power* berdiplomasi menjadi katalisator dalam meredakan krisis yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi karena Kurangnya keterlibatan *middle power* akan menjadi sebuah kerugian dalam penyelesaian krisis.³⁶

4. Niche Diplomacy

³⁴ Charalampos Efstathopoulos, "Middle Power and The Behavioral Model": 55

³⁵ Charalampos Efstathopoulos, "Middle Power and The Behavioral Model": 57

³⁶ Charalampos Efstathopoulos, "Middle Power and The Behavioral Model": 58

Middle power cenderung menggunakan *niche diplomacy* untuk mengamankan pengaruh dalam rezim internasional. *Niche diplomacy* termasuk didalamnya memusatkan sumber daya diplomatik dibidang tertentu yang paling dikuasai untuk memberi hasil lebih daripada mencoba menguasai semua bidang. *Niche diplomacy* menjadi pilihan *middle power* karena bersifat *selective engagement* dalam dua dimensi: bersifat multilateral dan menyasar area kritis tata kelola global. *Selective engagement* ini menghendaki dan memungkinkan *middle power* mengusahakan solusi tingkat lanjut permasalahan global yang membutuhkan intervensi diplomasi.³⁷

5. Intellectual and Entrepreneurial Leadership

Middle power harus mampu membuktikan kemampuan *intellectual leadership* dan *entrepreneurial leadership*. Kedua bentuk *leadership* ini membuat *middle power* bisa bertindak sebagai katalisator, fasilitator, dan *bridge builder* dalam manajemen dan formasi rezim. Fungsi dari kedua jenis *leadership* ini adalah untuk menjadi contoh yang bisa ditiru dan meyakinkan yang lain untuk menyetujui ide dan posisi negosiasi yang spesifik. Dan untuk menjadi *middle power*, penggunaan kedua jenis *leadership* ini tidak cukup hanya sebagai pendukung, tetapi juga harus mampu melawan kepentingan *major powers*.³⁸

6. Membangun Koalisi dengan Like-Minded States

Middle power cenderung membentuk dan memimpin koalisi negara-negara yang 'senasib' (*like-minded states*). Dibanding dengan negara-negara lain, *middle power* akan menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk memimpin koalisi negara-negara 'sepemikiran' dan memperlihatkan perilaku koalisi yang lebih

³⁷ Charalampos Efstathopoulos, "Middle Power and The Behavioral Model": 59

³⁸ Charalampos Efstathopoulos, "Middle Power and The Behavioral Model": 60

asertif. Tindakan ini membuat *small states* dan aktor non pemerintah mau bergabung dalam koalisi demi membendung pengaruh *major power* dalam forum multilateral.³⁹

Enam aspek dalam konsep ini akan diaplikasikan oleh peneliti sebagai alat analisis kebijakan luar negeri Indonesia dibidang perdamaian dan keamanan internasional serta kebijakan lainnya dibidang yang relevan sebagai bentuk kontribusi yang ingin ditunjukkan Indonesia dalam kampanye pencalonan sebagai Anggota Tidak tetap DK PBB. Melalui konsep ini, peneliti akan melihat upaya Indonesia sebagai *middle power* dalam kampanye untuk memenangkan pencalonan sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk periode 2019-2020.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pencarian makna dibalik realitas sosial sehingga tercapai pemahaman yang mendalam dan tidak berdasarkan pengukuran angka.⁴⁰ Penelitian kualitatif menekankan pada aspek pemahaman mendalam terhadap suatu masalah.⁴¹ Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan aktor sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh

³⁹ Charalampos Efstathopoulos, "Middle Power and The Behavioral Model": 62

⁴⁰ Gary King, et.al., "Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research", (New Jersey: Princeton University Press, 1994)

⁴¹ John W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach 4th edition", (California: Sage Publication, 2013)

peneliti dan subjek peneliti.⁴² Berangkat dengan pertanyaan penelitian yaitu “bagaimana” sehingga jenis metode penelitian akan cenderung bersifat deskriptif untuk menjelaskan sebuah proses atau perilaku. Peneliti akan mengumpulkan data-data dari berbagai sarana. Kemudian, dengan data-data ini peneliti akan membangun dan memahami realitas dengan memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas kemudian mendeskripsikan kejadian dengan cara yang sistematis, faktual dan akurat dalam hal penelitian ini mendeskripsikan upaya Indonesia sebagai middle power dalam pencalonan menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020.

1.8.2. Batasan Penelitian

Batasan waktu untuk penelitian ini dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Tahun 2016 dijadikan sebagai titik awal penelitian ini karena karena deklarasi kampanye Indonesia untuk pencalonan menjadi Anggota Tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 diumumkan pada tahun ini. Tahun 2018 dijadikan sebagai batas akhir penelitian karena proses pemilihan dan terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020 di Sidang Majelis Umum PBB terjadi pada tahun ini.

1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variable dependen adalah sebuah objek kajian yang perilakunya akan dideskripsikan dan dijelaskan secara detail dalam penelitian yang akan diteliti, sedangkan unit eksplanasi adalah yang menjadi dampak dari unit analisa yang ingin di amati sebagai variabel independen.⁴³ Unit analisis atau

⁴²Bogdan dan Taylor, *Prosedur Penelitian Dalam Moleong: Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 4, diakses November 15, 2019, <http://eprints.umpo.ac.id/1380/9/.pdf>.

⁴³Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1994) : 39

variabel dependen penelitian ini adalah Indonesia. Penelitian ini menjadikan Indonesia sebagai objek kajian yang perilakunya akan diteliti dan dianalisis. Unit eksplanasi atau variabel independen penelitian ini adalah pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak tetap DK PBB 2019-2020 karena proses pencalonan ini mempengaruhi perilaku unit analisis penelitian ini. Level analisis penelitian ini berada ditingkat negara karena penelitian ini menjelaskan upaya Indonesia sebagai negara calon Anggota Tidak tetap DK PBB 2019-2020.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai oleh peneliti adalah studi pustaka. Teknik ini menuntut peneliti untuk mengumpulkan fakta dan data sekunder tertulis dari artikel, jurnal, buku, berita, laporan dan dokumen resmi, publikasi, media elektronik serta pencarian informasi melalui internet yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁴ Berdasarkan kerangka konseptual, penelitian ini memerlukan sumber data penelitian ini berasal dari situs resmi DK PBB (www.un.org/securitycouncil), pustaka digital PBB (<https://digitallibrary.un.org>) situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia (www.kemlu.go.id), serta situs yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia khusus untuk kampanye dalam pencalonan menjadi Anggota Tidak tetap DK PBB (indonesia4unsc.kemlu.go.id).

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari literatur yang sudah lebih dahulu meneliti dan memperoleh data-data tentang kebijakan luar negeri Indonesia dibidang perdamaian dan keamanan internasional seperti *Understanding Motivation Behind States's Participation to the UN Peacekeeping*

⁴⁴Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), 156.

*Operations A Case Study of Indonesia*⁴⁵ dan tentang perilaku Indonesia sebagai *middle power* seperti dalam artikel *The Roots and Evolution of Indonesia's Middle Power Activism*⁴⁶ dan *Walking the Middle Path: the characteristics of Indonesia's Rise*.⁴⁷

1.8.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data oleh peneliti untuk membuat sebuah penjelasan atau objek secara logis dan sistematis dan mencapai kesimpulan.⁴⁸ Berdasarkan kerangka konseptual, jenis dan pendekatan penelitian, analisis penelitian ini akan dijabarkan dengan metode kualitatif deskriptif untuk menghasilkan pengetahuan tertentu pada waktu tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.⁴⁹ Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, Peneliti menggunakan teknik analisis berdasarkan kerangka konsep dan aspek yang menjadi alat bedah bagi peneliti untuk membuat pola, mengambil hal penting dan menyimpulkan perilaku Indonesia dalam kampanye pencalonan sebagai Anggota Tidak tetap DK PBB 2019-2020 yang kemudian mampu memenangkan pencalonan ini.

Berikut tahapan analisis data yang akan peneliti lakukan untuk penelitian ini. Peneliti akan berangkat dari data yang berdasarkan variabel dan alur penelitian. Data-data yang dikumpulkan adalah tentang rekam jejak pencalonan dan keanggotaan Indonesia di DK PBB serta data tentang politik dan kebijakan

⁴⁵Aisha Fauzia, "Understanding Motivation Behind States's Participation to the UN Peacekeeping Operations A Case Study of Indonesia" (master's thesis, Leiden University, 2018)

⁴⁶Raditya M. Kusumaningprang, "The Roots and Evolution of Indonesia's Middle Power Activism", *The Indonesian Quarterly* Second Vo. 45 No 2 (July, 2017)

⁴⁷Awidya Santikajaya, "Walking the Middle Path: the characteristics of Indonesia's Rise" *International Journal* Vol 71 (4) (2016)

⁴⁸Barbara D. Kawulich, *Data Analysis Technique in Qualitative Research* (State University of Georgia: Georgia), 97.

⁴⁹Mukhtar, "*Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*", Jakarta: GP Press Group, (2013): 10-11

luar negeri Indonesia. Data pada variabel ini menjadi penting disajikan sebagai langkah awal untuk menggambarkan dasar isu yang diangkat dalam penelitian ini.

Selanjutnya, peneliti akan menganalisis data-data yang kebijakan luar negeri Indonesia yang relevan dengan isu ini. Data-data tersebut akan peneliti interpretasikan dengan kerangka konseptual dalam bentuk deskripsi sampai mencapai titik kesimpulan. Interpretasi ini akan menempatkan data sesuai dengan enam aspek dalam kerangka konseptual dan disertai penjelasan kenapa data tersebut menjadi data yang membenarkan hipotesis yaitu kebijakan mana yang menunjukkan perilaku Indonesia sebagai *middle power* dengan aspek *good international citizenships*, *multilateralisme*, *leadership in crisis management*, *niche diplomacy*, *intellectual and entrepreneurial leadership*, dan *coalition with like-minded states*.

Aspek *good international citizenship* dalam konsep *middle power* model perilaku akan mendeskripsikan kontribusi Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang perdamaian internasional, keamanan internasional dan bidang lain yang relevan. Aspek *multilateralisme* akan mendeskripsikan perilaku Indonesia yang cenderung melibatkan banyak negara dalam proses penyelesaian masalah ditingkat internasional. Aspek *leadership in crisis management* akan mendeskripsikan perilaku kepemimpinan Indonesia dalam krisis kemananan dan kemanusiaan yang ada di luar negeri. Aspek *niche diplomacy* akan mendeskripsikan perilaku Indonesia yang memilih isu dan bidang yang spesifik dan mengerahkan sumber daya untuk memenangkan diplomasi dalam bidang spesifik tersebut. Aspek *intellectual and entrepreneurial leadership* akan mendeskripsikan perilaku

Indonesia yang mengusahakan solusi yang seimbang antara *major power* dan *small power*. Terakhir, aspek *coalition with like-minded states* akan mendeskripsikan perilaku Indonesia yang cenderung berkoalisi dengan sesama negara *middle power*.

1.9 Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : REKAM JEJAK KEANGGOTAAN DAN PENCALONAN INDONESIA DI DEWAN KEAMANAN PBB

Bab ini berisikan deskripsi rekam jejak sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB Indonesia pada periode-periode sebelumnya. Bab ini juga memaparkan situasi pada saat proses pencalonan Indonesia dan kontestasi yang dialami Indonesia untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB pada periode-periode tersebut.

BAB III : SOROTAN POLITIK DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TAHUN 2016-2018

Bab ini akan mendeskripsikan sorotan politik dan kebijakan luar negeri Indonesia yang mendukung kampanye pencalonan sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB mulai saat mengumumkan kampanye pencalonan tahun 2016 sampai tahun 2018 saat terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020.

BAB IV : ANALISIS UPAYA INDONESIA SEBAGAI *MIDDLE POWER* DALAM PENCALONAN SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA TAHUN 2019-2020

Bab ini akan menganalisis politik dan kebijakan luar negeri Indonesia sesuai aspek kerangka konseptual sehingga bisa dikategorikan sebagai politik dan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerangka *middle power* yang berhasil dalam pencalonan menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan mendeskripsikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti terkait upaya Indonesia untuk pencalonan sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB 2019-2020 serta saran untuk penelitian selanjutnya.

